

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG
TELAH DISETUJUI DPR DAN DIUNDANGKAN TAHUN 2006
(SEBANYAK 26 RUU)**

A. RUU YANG BERASAL DARI DPR (INISIATIF DPR) = ADA 12			
NO	JUDUL RUU	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.(LN No. 22, TLN No. 4611)	- Dep. Hukum dan HAM - Dep. Agama
2	RUU tentang Pemerintahan Aceh.	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. (LN No. 62, TLN No. 4633)	- Dep. Dalam Negeri - Sekretariat Negara - Dep. Kominfo
3	RUU tentang Kewarganegaraan RI	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (LN No. 63, TLN No. 4634)	- Dep.Hukum dan HAM
4	RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (LN No. 64, TLN No. 4635)	- Dep.Kum dan HAM
5	RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (LN No. 85, TLN No. 4654)	- Dep.Kum dan HAM - Dep. Keuangan
6	RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Nopember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (LN No. 92, TLN No. 4660)	- Dep.Kum dan HAM - Dep. Pertanian - Dep. Kehutanan - Dep. Perikanan
7	RUU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Penasihat Presiden (LN No. 108, TLN No. 4670)	- Dep.Kum dan HAM - Sekretariat Negara
8	RUU tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (LN No. 123, TLN No. 4673)	

9	RUU tentang Administrasi Kependudukan	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (LN No. 124, TLN No. 4674)	- Dep. Dalam Negeri - Dep. Hukum dan HAM
10	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.	RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR RI dan Presiden pada tanggal 8 Desember 2006.	Dep. Dalam Negeri
11	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR RI dan Presiden pada tanggal 8 Desember 2006.	Dep. Dalam Negeri
12	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara.	RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR RI dan Presiden pada tanggal 8 Desember 2006.	Dep. Dalam Negeri

B. RUU YANG BERASAL DARI PEMERINTAH = ADA 14

NO	JUDUL RUU	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1	RUU tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Maret 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. (LN No. 18, TLN No. 4607)	- Dep. Hukum dan HAM
2	RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003 (Ln No. 21, TLN No. 4610)	- Dep. Keuangan
3	RUU tentang Pengesahan Internasional <i>Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture</i> (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian)	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Internasional <i>Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture</i> (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (LN No. 23, TLN No. 4612)	- Dep. Pertanian
4	RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (<i>International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing</i>)	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 April 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (<i>International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing</i>) (LN No. 28, TLN No. 4616)	Prioritas Tahun 2006 - Dep. Luar Negeri - Dep. Hukum dan HAM
5	RUU tentang Pengesahan <i>International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999</i> (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 April 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan <i>International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999</i> (Konvensi	Prioritas Tahun 2006 - Dep. Luar Negeri - Dep. Hukum dan HAM

		Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) (LN NO. 29, TLN No. 4617)	
6	RUU tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 (<i>United Nations Convention Against Corruption, 2003</i>)	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 April 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 (<i>United Nations Convention Against Corruption, 2003</i>) (LN No. 32, TLN No. 4620)	Prioritas Tahun 2006 - Dep. Luar Negeri - Dep. Hukum dan HAM
7	RUU tentang Pengesahan Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Rep. Indonesia dan Cina	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 April 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Rep. Indonesia dan Cina (LN No. 33, TLN No. 4621)	- Dep. Luar Negeri - Dep. Hukum dan HAM
8	RUU tentang Sistem Resi Gudang	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 14 Juli 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (LN No. 59, TLN NO. 4630)	- Dep. Perdagangan
9	RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Juli 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN NO. 60, TLN No.4631)	- Dep. Dalam Negeri - Dep.Kum dan HAM
10	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 9 Oktober 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (LN No. 84, TLN No. 4653)	-Dep.Kum dan HAM - Dep. Keuangan
11	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepabeanan	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Nopember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (LN No. 93, TLN No. 4661)	-Dep.Kum dan HAM - Dep. Keuangan
12	RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2007	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Nopember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun Anggaran 2007 (LN No. 94, TLN No. 4662)	-Dep.Kum dan HAM - Dep. Keuangan
13	RUU tentang <i>Pengesahan Convention on the Prohibition of the Use Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel, Mines and their Destruction</i> (Konvensi Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personal dan Pemusuhannya).	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang <i>Pengesahan Convention on the Prohibition of the Use Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel, Mines and their Destruction</i> (Konvensi Pelarangan Penggunaan,	- Dep. Luar Negeri - Dep. Pertahanan

		Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personal dan Pemusuhannya). (LN NO. 121, TLN No. 4671)	
14	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Gov. of the Rep. of India on Coopertive Activities in the Defence</i>)	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Gov. of the Rep. of India on Coopertive Activities in the Defence</i>) (LN NO. 122, TLN No. 4672)	- Dep. Pertahanan - Dep. Luar Negeri

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG
TELAH DISETUJUI DPR DAN DIUNDANGKAN TAHUN 2006
(SEBANYAK 26 RUU)**

A. RUU YANG BERASAL DARI DPR (INISIATIF DPR) = ADA 12			
NO	JUDUL RUU	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.(LN No. 22, TLN No. 4611)	- Dep. Hukum dan HAM - Dep. Agama
2	RUU tentang Pemerintahan Aceh.	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. (LN No. 62, TLN No. 4633)	- Dep. Dalam Negeri - Sekretariat Negara - Dep. Kominfo
3	RUU tentang Kewarganegaraan RI	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (LN No. 63, TLN No. 4634)	- Dep.Hukum dan HAM
4	RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (LN No. 64, TLN No. 4635)	- Dep.Kum dan HAM
5	RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (LN No. 85, TLN No. 4654)	- Dep.Kum dan HAM - Dep. Keuangan
6	RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Nopember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (LN No. 92, TLN No. 4660)	- Dep.Kum dan HAM - Dep. Pertanian - Dep. Kehutanan - Dep. Perikanan
7	RUU tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Penasihat Presiden (LN No. 108, TLN No. 4670)	- Dep.Kum dan HAM - Sekretariat Negara
8	RUU tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (LN No. 123, TLN No. 4673)	

9	RUU tentang Administrasi Kependudukan	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (LN No. 124, TLN No. 4674)	- Dep. Dalam Negeri - Dep. Hukum dan HAM
10	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.	RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR RI dan Presiden pada tanggal 8 Desember 2006.	Dep. Dalam Negeri
11	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR RI dan Presiden pada tanggal 8 Desember 2006.	Dep. Dalam Negeri
12	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara.	RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR RI dan Presiden pada tanggal 8 Desember 2006.	Dep. Dalam Negeri

B. RUU YANG BERASAL DARI PEMERINTAH = ADA 14

NO	JUDUL RUU	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1	RUU tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Maret 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. (LN No. 18, TLN No. 4607)	- Dep. Hukum dan HAM
2	RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003 (Ln No. 21, TLN No. 4610)	- Dep. Keuangan
3	RUU tentang Pengesahan Internasional <i>Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture</i> (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian)	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Internasional <i>Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture</i> (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (LN No. 23, TLN No. 4612)	- Dep. Pertanian
4	RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (<i>International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing</i>)	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 April 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (<i>International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing</i>) (LN No. 28, TLN No. 4616)	Prioritas Tahun 2006 - Dep. Luar Negeri - Dep. Hukum dan HAM
5	RUU tentang Pengesahan <i>International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999</i> (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 April 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan <i>International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999</i> (Konvensi	Prioritas Tahun 2006 - Dep. Luar Negeri - Dep. Hukum dan HAM

		Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) (LN NO. 29, TLN No. 4617)	
6	RUU tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 (<i>United Nations Convention Against Corruption, 2003</i>)	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 April 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 (<i>United Nations Convention Against Corruption, 2003</i>) (LN No. 32, TLN No. 4620)	Prioritas Tahun 2006 - Dep. Luar Negeri - Dep. Hukum dan HAM
7	RUU tentang Pengesahan Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Rep. Indonesia dan Cina	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 April 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Rep. Indonesia dan Cina (LN No. 33, TLN No. 4621)	- Dep. Luar Negeri - Dep. Hukum dan HAM
8	RUU tentang Sistem Resi Gudang	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 14 Juli 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (LN No. 59, TLN NO. 4630)	- Dep. Perdagangan
9	RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Juli 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN NO. 60, TLN No.4631)	- Dep. Dalam Negeri - Dep.Kum dan HAM
10	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 9 Oktober 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (LN No. 84, TLN No. 4653)	-Dep.Kum dan HAM - Dep. Keuangan
11	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepabeanaan	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Nopember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan (LN No. 93, TLN No. 4661)	-Dep.Kum dan HAM - Dep. Keuangan
12	RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2007	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Nopember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun Anggaran 2007 (LN No. 94, TLN No. 4662)	-Dep.Kum dan HAM - Dep. Keuangan
13	RUU tentang <i>Pengesahan Convention on the Prohibition of the Use Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel, Mines and their Destruction</i> (Konvensi Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personal dan Pemusuhannya).	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang <i>Pengesahan Convention on the Prohibition of the Use Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel, Mines and their Destruction</i> (Konvensi Pelarangan Penggunaan,	- Dep. Luar Negeri - Dep. Pertahanan

		Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personal dan Pemusuhannya). (LN NO. 121, TLN No. 4671)	
14	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Gov. of the Rep. of India on Coopertive Activities in the Defence</i>)	Telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Gov. of the Rep. of India on Coopertive Activities in the Defence</i>) (LN NO. 122, TLN No. 4672)	- Dep. Pertahanan - Dep. Luar Negeri